

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Abdul Cholik dan Muttaqin Habibullah, 2015, "*Pelayanan Publik Tingkat Desa*", Sagaf, Yogyakarta.
- Agung Kurniawan, 2005, "*Transformasi Pelayanan Publik*", Pembaruan, Yogyakarta.
- Agus Dwiyanto, 2005, "*Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*", Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Atep Adya Barata, 2003, "*Dasar-Dasar Pelayanan Prima*", Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Burhan Bugin, 2018, "*Pelayanan Prima Instansi Pemerintah*", Prenada Media, Jakarta.
- Daryanto dan Ismanto Setyobudi., 2014, "*Konsumen dan Pelayanan Prima*", Gava Media, Yogyakarta.
- Dian Utomo, 2010, "*Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)*", Direktorat Jendral Pemerintahan Umum, Jakarta.
- Falih Fuadi dan Bintoro Wardiyanto, 2010, "*Revitalisasi Administrasi Negara, Reformasi Birokrasi dan E-governance*", Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Hadi Sabari Yunus, 2010, "*Metodelogi Penelitian Wilayah kontenporer*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Harbani Pasolong, 2007, "*Teori Administrasi Publik*", CV Alfabeta, Bandung
- H. Zainuddin Ali, 2013, "*Metode Penelitian Hukum*", Sinar Grafika, Jakarta.
- Juanda Nawawi, 2012, "*Desentralisasi Dan Kinerja Pelayanan Publik*", Menara Intan, Makassar.
- Juhana Wijaya, 2004, "*Bekerja Sama dengan Kolega dan Pelanggan*", Armico, Bandung.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Pertama*", Kencana, Jakarta.

Khoirul Anwar dkk, 2003, "*Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan di Otonomi Daerah (SIMDA)*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Lijan Poltak Sinambela, 2010, "*Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*", PT. Bumi Aksara, Jakarta.

_____, dkk, 2006, "*Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi*", STIALAN Pess, Jakarta.

Nina Rahmayanty, 2013, "*Manajemen Pelayanan Prima: Mencegah Pembelotan Dan Membangun Customer Loyalty*", Graha Ilmu, Jakarta.

Rianto Adi, 2015, "*Aspek Hukum Dalam Penelitian*", Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Richardus Eko Indrajit, 2002, "*Electronic Government : Strategi Penmbangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik berbasis Teknologi Digital*," Andi, Yogyakarta.

_____, 2006, "*Electronic Government : Konsep Pelayanan Public Berbasis Internet dan Teknologi Informasi*", APTIKOM, Jakarta.

Sri Maulidiah, 2014, "*Pelayanan Publik Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)*", CV. Indra Prahasta, Bandung.

Sujardi, 2009, "*Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*", Refika Aditama, Jakarta.

Sunardi dan Purwanto, 2006, "*Pendidikan Kewarganegaraan*", Global Press, Yogyakarta.

Sutrisno Hadi, 2014, "*Metodelogi Research Jilid I*", Andi Offet, Yogyakarta.

Yuhefizar dkk, 2017, "*Naskah Akademik Dan Rancaagan Peraturan Dearah Tentang Penggeolaan E-Goverment Di Provinsi Sumatera Barat*", Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, Padang.

Yusriadi, 2018, "*Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*", Deepublish, Yogyakarta", 2018.

Jurnal:

Dila Firlena Dan Amni Zakarsyi Rahman, 2016, "*Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kecamatan Bergas*

- Kabupaten Semarang*”, Jurnal Of Public Policy And Manegemet Review, Vol. 5, No. 2, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Enan Sugiarto, 2016, “*Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Terhadap Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Dan/Atau Hasil Cetaknya Sebagai Alat bukti Dalam Perkara Perdata*”, Rechtidee, Vol.11.No.2.
- Rethorika Berthanila, 2016, “*Studi Pendahuluan atas Analisis Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Serang Menuju Konsep Pelayanan Berbasis Good Governance*”, Jurnal Sawala, Vol. 4, No. 2, 2016, FISIP Universitas Serang Raya, Serang.
- Rizqi Fajar Eko dkk, “*Implementasi Kebijakan Paten (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Pelayanan E-Ktp Di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo)*”, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 11, Universitas Brawijaya, Malang.
- Suhartoyo, 2019, “*Implementasi Fungsi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)*”, Jurnal Administrative Law & Governance, Vol. 2, No. 1, 2019, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Website:

Balai Permasalahatan Kelas II B Klaten Kantor wilayah Kemetrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, “Prinsip Pelayanan Publik Yang Harus Diketahui” <http://bapasklaten.kemenkumham.go.id/berita-utama/prinsip-pelayanan-publik-yang-harus-diketahui>, diakses pada 08 September 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. diakses melalui, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/>, 08 September 2021

